

BAB I

PENDAHULUAN

Istilah ‘pembangunan’, seperti halnya istilah ‘masyarakat’ memiliki beragam makna. ‘Pembangunan’ merupakan istilah yang bersifat umum yang mengacu kepada perubahan secara umum. Apabila diletakkan pada konteks sosial, pembangunan sering dilihat dalam kerangka kerja evolusi sosial. Kerangka kerja evolusi sosial mengacu kepada arahan perubahan untuk menciptakan diferensiasi, kompleksitas, dan integrasi berbagai bagian masyarakat agar mampu melakukan adaptasi aktivitas-aktivitas sosial untuk merubah kondisi sosial. Pada umumnya, definisi pembangunan ini mengacu kepada ide kehidupan yang lebih baik (Kenny, 2006:10).

Program pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa menekankan pada kebutuhan akan konsep pembangunan yang berbeda. *‘The paradigm shift is still in the making. But more and more policymakers in many countries are reaching the unavoidable conclusion that, to be valuable and legitimate, development progress, not nationally and internationally—must be people centred, equitably distributed, and environmentally and socially sustainable’* (UNDP, 1996:iii dalam Kenny, 2006:12).

Tantangan masyarakat dunia pada abad ke-21 yang semakin berat, terutama menyangkut pembangunan yang tidak seimbang, kemiskinan, dan ketidakadilan yang semakin menyolok. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Millenium Development Goals (MDGs)* yang mulai dicanangkan pada tahun 2000 mengandung delapan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2015. MDGs bertujuan dan berusaha menekankan pada kebutuhan masyarakat dan individu miskin serta terpinggirkan. Tujuan MDGs meliputi delapan macam antara lain: pemberantasan kemiskinan; pencapaian pendidikan dasar; mengembangkan kesamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta gadis remaja; pengurangan kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; menjamin keberlanjutan lingkungan; serta

membangun kerja sama global (Melkote, 2012:15). *MDGs* merupakan *benchmark* yang memberi pedoman bagi pemimpin dan pembuat keputusan di lingkungan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah serta kelompok masyarakat lain yang peduli terhadap ketidakseimbangan pembangunan masyarakat secara luas.

Ada tiga kunci utama tujuan pembangunan menurut Todaro (Kenny, 2006:11), yakni: (1) untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang untuk menunjang kehidupan, seperti pangan dan perumahan; (2) menaikkan standar hidup, termasuk meningkatkan perhatian terhadap nilai-nilai budaya sebagaimana halnya dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan; (3) memperluas skala ekonomi dan pilihan sosial dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan mengenai kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Doyal and Gouhg (1991) bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi manusia tidak hanya berupa kebutuhan fisik, namun juga kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Dari berbagai pandangan mengenai pembangunan yang berkembang selama ini, Melkote (2002:420) menyimpulkan setidaknya ada empat perspektif atau cara pikir mengenai pembangunan. *Pertama*, perspektif modernisasi yang didasarkan atas teori ekonomi neo-klasik dan dukungan pembangunan ekonomi kapitalis. Perspektif ini berasumsi bahwa model pertumbuhan ekonomi Barat bisa diaplikasikan oleh berbagai negara di mana introduksi teknologi modern merupakan syarat penting pembangunan. *Kedua*, perspektif kritis yang menentang ekspansi dan imperialisme ekonomi serta budaya oleh modernisasi. Perspektif ini memandang pentingnya restrukturisasi politik dan ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak distribusi atas sumber daya dan hasilnya berada di dalam dan di antara masyarakat. *Ketiga*, perspektif liberalisasi atau monastik yang diturunkan dari perspektif teologi pembebasan, di mana kebebasan individu dan masyarakat dari penindasan merupakan kunci kemandirian. Hal ini dipandang sebagai tujuan pembangunan. *Keempat*, konsep pemberdayaan yang mulai digunakan pada literatur komunikasi dan pembangunan pada tahun 1990-an, namun istilah, contoh, level analisis serta dampaknya belum diaplikasikan secara penuh. Lebih lanjut, pemberdayaan (*empowerment*) tidak bisa dipahami tanpa terlebih dahulu mendefinisikan kekuasaan (*power*).

Definisi Pengembangan Masyarakat

Istilah *Community Development* dipergunakan secara resmi di Inggris pada tahun 1948 untuk mengganti istilah lama *mass education* (pendidikan massal). Meskipun demikian, sejarah perkembangannya

dapat dilacak pada tahun 1925, ketika pemerintah Inggris menghadapi masalah yang terkait dengan tatanan hukum mereka. Pemerintah Inggris melalui Kantor Berita Kolonial (*The Colonial Office*) mengeluarkan suatu memorandum yang salah satu tujuannya adalah “untuk mengembangkan komunitas secara utuh”. Memorandum ini memaparkan cara-cara untuk meningkatkan kehidupan komunitas di daerah koloni mereka yang pada akhirnya dikenal dengan nama pengembangan masyarakat.

Community Development menggambarkan makna yang penting dari dua konsep, yaitu: *community* dan *development*. *Community* bermakna kualitas hubungan sosial. *Development* berarti perubahan menuju kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Pemerintah Kolonial Inggris mendefinisikan pengembangan masyarakat adalah gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas (Brokensha dan Hodge dalam Adi, 2001).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (1960) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut: *community development is the process by which the effort of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, sosial and kultural conditions of communities to integrate the communities into the life of the nation and enhance the contribute fully to national progress*”. Definisi di atas menekankan bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu “proses” di mana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Istilah pengembangan masyarakat (*community development*) telah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses. Artinya, semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa (Conyers, 1991).

Melengkapi definisi di atas, Arthur Dunham merupakan seorang pakar *Community Development* merumuskan definisi *Community Development* itu sebagai berikut.

“organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and self-direction. Community

Development seeks to work primarily through the enlistment and organization of self-help and cooperative efforts on the part of the residents of the community, but usually with eclipsed assistance from government or voluntary organization (Arthur Dunham 1958: 3).

Rumusan di atas menekankan bahwa pengembangan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pengembangan masyarakat bekerja, terutama melalui peningkatan organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat. Akan tetapi, biasanya dengan bantuan teknis, baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Isu pengembangan masyarakat berkembang dengan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan kehidupan manusia secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Dewasa ini, perkembangan dunia memperlihatkan berbagai ketimpangan yang terjadi di antara berbagai negara, terutama negara yang dianggap sebagai negara maju dan negara belum maju. Sementara negara yang mengklaim dirinya sebagai negara maju dan sejahtera, juga tidak terlepas dari permasalahan internal menyangkut pemenuhan hak warga negara atas nama kesejahteraan itu. Kelemahan negara kesejahteraan (*welfare state*) mulai muncul dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap negara kesejahteraan, sehingga meningkatkan krisis sumber daya. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat tinggi, pada satu sisi pengeluaran sosial oleh negara juga semakin meningkat (George & Wilding, 1984; Le Grand, 1982 *dalam* Ife & Tesoriero, 2008:5).

Pengembangan masyarakat mengacu kepada berbagai proses, tugas, praktik, dan visi untuk memberdayakan masyarakat untuk bertanggung jawab bersama bagi pembangunan mereka. Tujuan pengembangan masyarakat adalah menjadikan masyarakat memiliki kemampuan mengontrol tujuan mereka. Kontrol yang efektif membutuhkan struktur dan proses pembangunan terus menerus di mana masyarakat mampu mengidentifikasi dan merumuskan isu, kebutuhan, dan masalah dalam kerangka referensi mereka. Kontrol masyarakat yang efektif juga memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk pendapatan, sumber daya material, dan pengetahuan serta dasar keterampilan yang kokoh (Kenny, 2006:10).

Christenson dan Robinson (1989) *dalam* Soetomo (2010:81) mendefinisikan *community development* sebagai suatu proses di mana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial cultural, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam program *community development*, intervensi bukankah sebuah keharusan di mana kemandirian masyarakatlah yang utama.

Kenny (2006:12) menggunakan istilah pengembangan masyarakat (*community development*) dari pada kerja masyarakat (*community work*) karena istilah ini lebih fokus pada pentingnya perubahan dalam masyarakat. Hal ini senada dengan ide pembangunan sebagai ide mengenai transformasi. Dalam lingkungan pengembangan masyarakat, istilah '*community development*' mengacu pada sebuah pendekatan atau filosofi; sebuah kerja atau profesi; sebuah metode serta suatu intervensi atau aktivitas politik.

Christensen dan Robinson (1989:14 dalam Soetomo, 2010: 81-82) mendefinisikan *community development* sebagai suatu proses di mana masyarakat yang tinggal pada suatu lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan mereka. Definisi ini mengandung pemikiran bahwa masyarakat harus terlibat dan berpartisipasi dalam mendefinisikan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, menentukan tindakan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Pemanfaatan sumber daya lokal ini memberikan implikasi meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi sumber daya alam, manusia, maupun kultural setempat, serta bagaimana masyarakat memiliki kreativitas untuk mengelola dan memberi nilai tambah sumber daya tersebut untuk kepentingan mereka.

Pembangunan masyarakat merupakan proses berbagai usaha dilakukan oleh masyarakat itu bersama pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dengan memadukan seluruh masyarakat dalam kehidupan nasional dan memungkinkan mereka berkontribusi secara penuh dalam kemajuan bangsa. Ada dua elemen penting, yakni partisipasi masyarakat dalam meningkatkan standar kehidupan mereka secara mandiri berdasarkan inisiatif sendiri; serta tersedianya layanan teknik dan jasa untuk mengembangkan inisiatif, *self-help* dan *mutual-help* agar efektif

Adanya perkembangan konsep pembangunan masyarakat, akan mempengaruhi pengertian yang diberikan oleh para ahli. Berikut ini disajikan pengertian *community development* (CD) yang dikumpulkan dan diolah oleh Christenson dan Robinson (1989).